

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rizky Alif Alvian, pengajar di Universitas Gajah Mada, dalam tulisannya di *Tempo*, secara gamblang menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami episode autokratisasi atau kemunduran demokrasi. Bahkan, menurut Alvian, sampai saat ini belum ada tanda bahwa fase kemunduran demokrasi ini akan segera berakhir. Bukan tidak mungkin performa demokrasi Indonesia akan terus memburuk dalam tahun-tahun mendatang. Apabila gagal membendung episode autokratisasi yang tengah dialaminya, Indonesia dapat tergelincir dalam kategori yang lebih buruk, yakni *electoral autocracy*. Dalam rezim ini, walaupun partisipasi politik masih relatif terbuka, kontestasi politik cenderung dibatasi. Sementara itu, kekuasaan eksekutif berjalan makin sewenang-wenang. Masuknya Indonesia dalam kategori ini juga berarti bahwa Indonesia hanya perlu selangkah lagi untuk menjadi negara *closed autocracy*. Ini merupakan kategori paling ekstrem dalam spektrum rezim autokratik.¹

Kemunduran demokrasi yang mendera Indonesia saat ini juga diamini oleh sejumlah ahli atau pemerhati demokrasi, meskipun proyeksi tentang masa depan demokrasi di Indonesia tidak selalu sama di antara mereka. Endi Bayuni, misalnya, berbeda dengan Rizky Alif Alvian yang pesimis dengan masa depan demokrasi di Indonesia, Bayuni justru memiliki optimisme bahwa demokrasi di Indonesia akan terus bergerak maju. Menurut Bayuni, kemunduran demokrasi di Indonesia saat ini adalah bagian dari proses pematangan ke depan. Bayuni mengibaratkan demokrasi seperti tari *poco-poco* yang pernah populer di Indonesia. Demokrasi acap kali melibatkan dua langkah maju yang diikuti oleh satu langkah mundur ke belakang. Namun, selama kita tetap menari, tak ada yang bisa menghalangi kita untuk kembali

¹ Rizky Alif Alvian, "Demokrasi yang Bertahan", dalam *Koran Tempo*, 12 Februari 2024, <https://koran.tempo.co/read/opini/487202/upaya-mencegah-kemunduran-demokrasi>, diakses pada 26 Juli 2024.

melangkah ke depan.² Terlepas dari perbedaan proyeksi soal masa depan tersebut, kita sepakat tentang satu hal bahwa demokrasi di Indonesia saat ini sedang memasuki fase kemunduran yang cukup parah.

Potret kemunduran demokrasi di Indonesia terlihat jelas dalam aneka bentuk praktik busuk kekuasaan yang menganggangi nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu yang paling vulgar adalah perhelatan pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang ditandai dengan campur tangan kekuasaan yang teramat jauh. Jokowi, pemimpin yang lahir dari rahim reformasi, tanpa malu-malu menelanjangi kerakusannya akan kekuasaan dengan membangun dinasti politik. Dia membangun dinasti politiknya dengan mengusung Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, yang notabene adalah lawan politiknya dalam pilpres 2014 dan 2019. Bahkan, demi memuluskan langkah Gibran, konstitusi diobrak-abrik. Tidak berhenti di situ, bantuan sosial (bansos) juga dipolitisasi dan aparaturnya dimobilisasi untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Tak heran, jika pemilu 2024 dinobatkan sebagai pemilu terburuk sepanjang masa reformasi.

Bukan hanya pemilu yang jauh dari kata jujur dan adil, sampai hari ini juga Indonesia masih menderita kanker akut korupsi, lemahnya penegakan hukum, terkatung-katungnya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termarginalisasinya *demos* dari kebijakan-kebijakan publik, dan aneka macam persoalan lainnya. Seabrek persoalan tersebut menjadi catatan buruk untuk demokrasi di Indonesia. Tren penurunan kualitas demokrasi di Indonesia juga terlihat dari data indeks demokrasi yang dirilis oleh lembaga-lembaga pemeringkat demokrasi internasional. *Economist Intelligence Unit (EIU)* dalam rilis terbarunya, mencatat skor indeks demokrasi 2023 Indonesia sebesar 6,53. Angka tersebut turun dari 2022 yang kala itu sebesar 6,71. Penurunan skor itu sejalan dengan penurunan peringkat Indonesia. Jika tahun 2022 Indonesia menempati posisi 54, tahun 2023 Indonesia menempati posisi 56 dari 167 negara. Dengan skor dan peringkat tersebut, *EIU* masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara *flawed democracy*

²Endy Bayuni, "Apakah Demokrasi Indonesia Tengah Mengalami Kemunduran?", kata pengantar dalam Thomas Power dan Eva Warburton (ed), *Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), hlm. XVI.

atau demokrasi cacat.³ Data dari *Freedom House* juga menampilkan hal yang sama. Berdasarkan data *Freedom House*, indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada 2023.⁴

Kemunduran demokrasi di Indonesia sebenarnya bukan baru terjadi sekarang. Peneliti politik, Marcus Mietzner dari *Australian National University*, Australia, menyatakan bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia sudah terjadi sejak 2016 ketika Jokowi mencampuri urusan internal partai politik oposisi demi merayu atau memaksa mereka menyatakan dukungan untuknya.⁵ Namun, menurut Mietzner, juga Edward Aspinall, demokrasi di Indonesia berada di titik terendahnya sejak reformasi pada 2019. Kemunduran ini tidak terlepas dari fenomena penyempitan ruang kebebasan sipil akibat pembatasan dan intervensi kekuasaan terhadap aktivitas masyarakat sipil, seperti berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Sementara itu, menurut Vedi Hadiz kemunduran demokrasi di Indonesia dimulai pada 2017, yang ditandai dengan kemunculan politik illiberal yang direpresentasikan oleh kelompok Islam konservatif dari kalangan *hypernationalism* yang muncul dalam diskursus serta praktik politik pada saat pemilihan gubernur Jakarta pada 2017. Menurut Hadiz, persaingan antara kelompok Islam konservatif dan *hypernationalism* ini merupakan ciri persaingan intra oligarki yang menonjolkan karakter politik illiberal yang sudah berlangsung lama dalam demokrasi di Indonesia.⁶

Kemunduran demokrasi di era reformasi, khususnya pada masa pemerintahan Jokowi, tentu saja bisa dibaca dari beragam perspektif. Namun, hemat saya, salah satu sebab serius di balik kemunduran demokrasi saat ini, sebagaimana dikatakan oleh Vedi Hadiz, adalah oligarki. Oligarki, secara

³Tri Subarkah, "Angka Indeks Terus Turun, Demokrasi Indonesia Masih Cacat" dalam *Media Indonesia*, 16 Februari 2024, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/651955/angka-indeks-terus-turun-demokrasi-indonesia-masih-cacat>, diakses pada 26 Juli 2024.

⁴Willy Medi Christian Nababan, "Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam" dalam *Kompas*, 31 Januari 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/31/indeks-demokrasi-turun-kebebasan-pers-turut-terancam>, diakses pada 26 Juli 2024.

⁵Marcus Mietzner, "Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi's Indonesia", *Contemporary Southeast Asia*, 38;2, (ISEAS: Agustus 2016), hlm. 211.

⁶Vedi R. Hadiz, "Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?", *Buletin of Indonesian Economic Studies*, 53:3 (Routledge: September 2017), hlm. 276.

sederhana, adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil. Plato mendefinisikan oligarki sebagai bentuk pemerintahan yang bersandar pada penilaian dan penaksiran harta benda, di situ kaum kaya memiliki kekuatan, sedangkan kaum papa sama sekali tidak mempunyai hak untuk merasakan hal yang sama. Dalam negara semacam ini, sebagian besar warga kota menjadi maniak uang.⁷ Sementara Aristoteles mendefinisikan oligarki sebagai pemerintahan di mana orang yang mempunyai kekayaan adalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam konstitusi.⁸ Definisi yang diberikan oleh Plato dan Aristoteles ini, sekurang-kurangnya menegaskan satu hal bahwa oligarki merujuk pada kaum yang menguasai sumber daya material. Tapi, bukan hanya menguasai sumber daya material, oligarki juga, sebagaimana dikatakan oleh Jeffrey Winters di kemudian hari, identik dengan politik pertahanan kekayaan demi mengamankan harta bendanya. Namun, dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan konsep oligarki yang digagas oleh Vedi Hadiz untuk membedah penyebab kemunduran demokrasi di Indonesia saat ini.

Vedi R. Hadiz adalah ilmuwan sosial Indonesia yang *concern* meneliti dan menulis tentang isu ekonomi politik di Indonesia. Bersama Jeffrey Winters, Vedi Hadiz menjadi salah satu ilmuwan yang sering dirujuk pemikirannya tatkala berbicara tentang oligarki di Indonesia. Namun, berbeda dengan Jeffrey Winters yang lebih condong ke pendekatan personal dan kental dipengaruhi oleh analisis Weberian, Vedi Hadiz menggunakan pendekatan struktural yang lebih banyak dipengaruhi oleh analisis Marxian dalam mengkonstruksi konsep oligarki. Vedi Hadiz bersama Richard Robison dalam “*Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*” memahami oligarki sebagai sebuah relasi kekuasaan antara kelompok birokrat, pebisnis, serta politisi yang tergabung dalam sebuah kepentingan yang sama untuk menguasai sumber daya material, sehingga membentuk suatu *politico-business alliance*.⁹ Teori oligarki Hadiz dan Robinson menekankan relasi kekuasaan dalam mempertahankan kekayaan. Itulah

⁷Plato, *Republik* (VIII), terj. Sylvester G. Sukur (Yogyakarta: Narasi – Pustaka Prometheus, 2018), hal. 363.

⁸Aristoteles, *Politik*, terj. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Narasi, 2017), hal. 118.

⁹Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia; The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (London: Routledge, 2004), hlm. 34.

yang persis terjadi di Indonesia yakni, persekongkolan jahat antara institusi politik dan ekonomi untuk kepentingan partikular tertentu dan memunggungi kepentingan umum. Karena itu, demokrasi di Indonesia sesungguhnya adalah demokrasi semu; sampulnya demokrasi, isinya oligarki.

Vedi R. Hadiz dan Richard Robison menggambarkan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini sedang mengalami stagnansi bahkan kemunduran karena ia justeru dibajak oleh para elit sendiri, yang mereka sebut sebagai elit predator.¹⁰ Lebih lanjut, Vedi Hadiz berkata bahwa demokrasi di Indonesia dibajak oleh oligarki sejak awal demokratisasi, karena ketika Orde Baru turun tidak ada kekuatan-kekuatan progresif yang bisa menggantikannya. Kelompok elit lama yang selama masa Orde Baru berkonspirasi dengan Soeharto hanya mengubah dirinya menjadi demokrat dengan membuat partai-partai politik yang dulu membahas integralisme Orde Baru tiba-tiba menjadi pro-demokrasi.¹¹ Menurut Hadiz dan Robison, transisi dari rezim otoritarian Orde Baru ke era reformasi tidak berlangsung linear. Elit predatoris-yakni politisi, birokrat, dan pebisnis yang membentuk *politico bussines alliances* untuk kepentingan individu dan kelompok yang diinkubasi sejak kejayaan Orde Baru tetap mendapatkan posisi strategisnya di era Reformasi dengan menyesuaikan diri di dalam sistem politik demokrasi dengan masuk dalam partai politik, pemerintahan, dan legislatif, dan perlahan-lahan membajak institusi demokrasi untuk kepentingan mereka. Dengan kata lain, era reformasi adalah momentum reorganisasi kekuatan politik lama ke dalam periode politik yang baru. Demokrasi di era reformasi adalah demokrasi berwajah Orde Baru karena relasi-relasi kekuasaan aktor-aktor politik yang terjalin dalam era Orde Baru masih terpelihara dalam institusi-institusi sentral saat ini.¹²

Maka, menurut Vedi Hadiz, apa yang dipandang sebagai “kemunduran” dalam masa pemerintahan Jokowi sebenarnya adalah konsekuensi logis dari trajektori perkembangan tatanan demokrasi Indonesia yang illiberal. Demokrasi

¹⁰ Wijayanto, “Oligarki, Ketimpangan Ekonomi, dan Imajinasi Politik Kita”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/06460031/oligarki-ketimpangan-ekonomi-dan-imajinasi-politik-kita>, diakses pada 27 Juli 2024.

¹¹ Insan Wawasan, hasil wawancara dengan Vedi R. Hadiz, “Vedi Hadiz: Kuasa Oligarki Dilanggengkan lewat Populisme Islam”, <https://www.balairungpress.com/2018/08/19211/>, diakses pada 27 Juli 2024.

¹² Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz, *Op. cit.*, hlm.187.

yang tumbuh di Indonesia-pasca tumbangnya Soeharto-tidak pernah bisa melepaskan dirinya dari cengkraman kuasa oligarki yang dibesarkan oleh Orde Baru.¹³ Oligarki masih memegang kendali atas sistem perpolitikan di Indonesia saat ini. Mereka membangun koalisi dengan kekuasaan dan bersama-sama menggembosi demokrasi. Konsekuensinya, *demos*, pemilik kedaulatan yang sesungguhnya, justeru termarginalisasi dari berbagai kebijakan publik. Karena itu, adalah suatu kemendesakan untuk membongkar dan mengakhiri perselingkuhan gelap oligarki dan kekuasaan demi memulihkan demokrasi dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

Dalam aras itu, dengan bertolak dari pemikiran Vedi Hadiz, saya mencoba menganalisis konspirasi gelap oligarki dan kekuasaan, khususnya di era Jokowi, yang berkontribusi bagi terciptanya kemunduran demokrasi di Indonesia dan mengajukan langkah-langkah solutif untuk menyelesaikannya. Keseluruhan analisis dan pembahasan tersebut bernaung di bawah judul: **Kemunduran Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Teori Oligarki Vedi R. Hadiz.**

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana potret kemunduran demokrasi di Indonesia? *Kedua*, Bagaimana kemunduran demokrasi di Indonesia dibaca dari perspektif teori oligarki Vedi R. Hadiz? Dan apakah sistem oligarki adalah akar dari kemunduran demokrasi di Indonesia pada masa Jokowi? *Ketiga*, bagaimana langkah-langkah melawan dominasi oligarki tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3. 1 Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan umum penulisan ini ialah: *pertama*, memaparkan potret kemunduran demokrasi di Indonesia. *Kedua*, mendiskusikan realitas kemunduran demokrasi di Indonesia dalam terang teori oligarki Vedi R. Hadiz dan mendeteksi sistem oligarki sebagai penyebab utama

¹³Usman Hamid dan Darmawan Triwibowo dalam Thomas Power dan Eva Warburton (ed), *Op.cit.*, hlm. XVII.

kemunduran demokrasi di Indonesia. *Ketiga*, menjelaskan tentang langkah-langkah untuk melawan dominasi oligarki tersebut.

1.3. 2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum di atas, penulisan ini juga memiliki tujuan khusus yakni untuk memenuhi sebagian dari syarat meraih gelar sarjana filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Manfaat Penulisan

Telaah kemunduran demokrasi di Indonesia dengan memakai teori oligarki Vedi R. Hadiz, diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami mekanisme kerja oligarki yang berkontribusi bagi terciptanya kemunduran demokrasi di Indonesia. Di samping itu, tulisan ini juga dapat memperkaya diskursus tentang kemunduran demokrasi di Indonesia.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang dipakai dalam dalam penulisan ini ialah metode kualitatif deskriptif/analitis. Dalam usaha penulisan, penulis mencari dan mendalami sejumlah literatur yang ditulis oleh Vedi R. Hadiz, terutama yang berkaitan dengan oligarki. Selain itu, penulis menelusuri bacaan-bacaan serta mendiskusikan tema-tema seputar kemunduran demokrasi di Indonesia. Di samping mendalami literatur tertulis, penulis juga mendengar kuliah dan ceramah tentang Vedi R. Hadiz, oligarki, dan kemunduran demokrasi di Indonesia, baik secara daring maupun luring.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini dibagi ke dalam empat (4) bab. Bab I mencakup latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II memuat diskursus singkat tentang oligarki. Lalu, diikuti dengan uraian tentang teori oligarki dari Vedi R. Hadiz. Namun sebelum itu, penulis akan memaparkan terlebih dahulu riwayat hidup dan karya-karya dari Vedi R. Hadiz. Bab III memuat analisis tentang kemunduran demokrasi di Indonesia dari perspektif teori oligarki Vedi R. Hadiz. Analisis ini

akan didahului oleh pemaparan tentang potret kemunduran demokrasi di Indonesia dan ditutup dengan tawaran solusi untuk melawan dominasi oligarki serta catatan kritis terhadap pemikiran Hadiz. Bab IV memuat kesimpulan dan usul - saran.